

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU SEKOLAH DASAR
DI KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2012**

By : Elmi Rahmayanti
Elmirahmayanti@rocketmail.com
Supervisor : DR. Khairul Anwar, M.Si
Library of Riau University

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus bina widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Education has important implication to build civilizations. with education everyone could develop potential in themselves and survive in life. Teacher certification as an effort to boost teacher's qualification is also expected to improve learning quality and quality education continuously. This research to explain implementation teacher's certification in elementary school to improve the quality of education. This research using theory of implementing public policy from Daniel A. Mazmanian and Paul A. Sabatier with qualitative approach and descriptive method. This research is done through with in-depth interview and documentation technique. Data analysis with reduction, organization and interpretation data.

The result of this research is the implementation of teacher's certification is working unwell, they have not increase in performance significantly. This problem is effect from there are not rule about implementation of teacher's certification after get the professional educator certificate. Less of comitmen and skills of the teacher and low concern who society have about education development in Kecamatan Keritang.

Keyword : Implementating public policy, teacher's certification

PENDAHULUAN

Pendidikan berperan penting untuk memajukan peradaban manusia.¹ Pendidikan diarahkan kepada pembentukan manusia yang berguna. Tujuan pendidikan pada intinya untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Manusia Indonesia yang berkualitas adalah manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh dan bertanggungjawab, mandiri, cerdas dan terampil, serta sehat jasmani dan rohani.

Salah satu cara untuk meningkatkan profesionalitas guru adalah melalui program sertifikasi. Program sertifikasi guru adalah upaya pemerintah untuk mengidentifikasi guru-guru yang berkualitas dan berkompentensi. Guru profesional yang dinyatakan dalam bentuk pemberian sertifikat pendidik, merupakan dasar untuk memberikan tunjangan profesi. Guru yang memperoleh tunjangan profesi dikategorikan sebagai guru profesional yang wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.² Secara formal kebijakan ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia sesuai dengan data yang dikeluarkan Balitbang Depdiknas pada tahun 2003. Dari 146.052 SD ternyata hanya 8 SD yang mendapatkan pengakuan dunia dalam kategori *The Primary Years Program (PYP)*.³ Rendahnya kualifikasi pendidikan guru, seperti yang disampaikan oleh Gino Vanolie, Sekretaris Jendral Forum Martabat Guru Indonesia menjelaskan bahwa guru yang belum berpendidikan S-1 atau D-4 secara nasional mencapai 60%.⁴

Tabel 1.2
Kualifikasi Pendidikan Guru di Indonesia

SD	SMP	SMA	SMK
605.217	167.643	75.684	63.962
Jumlah			912.505

Sumber : Baskoro Poedjinoegroho. 5 Januari 2006.
Diakses tanggal 23 Januari 2014. Waktu :
16.00 wib. <http://kompas.com>

Fakta lain menunjukkan bahwa mutu guru di Indonesia masih jauh dari memadai. Berdasarkan statistik 60% guru SD, 40% guru SLTP, 43% SMA, 34% SMK dianggap belum layak untuk mengajar di jenjang masing masing. Selain itu 17.2% guru atau setara dengan 69.477 guru mengajar bukan bidang studinya.⁵ Pada

¹ Rukiyati. 2013. *Urgensi Pendidikan Karakter Holistik Komprehensif di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Karakter, Tahun III, No. 2. Hal : 196. Yogyakarta : FIP Universitas Negeri Yogyakarta.

² Aris Shoimin, *Excellent Teacher : Meningkatkan Profesionalisme Guru Pasca Sertifikasi*, (Semarang : Dahara Prize, 2013), Hal : iii

³ Suwardi. *Dampak Sertifikasi terhadap Peningkatan Kualitas Guru*. Hal : 1

⁴ *Ibid*. Hal:5

⁵ Satria Dharma:From:[http:// suarakita. com/artikel. html](http://suarakita.com/artikel.html)

skala regional, ternyata kompetensi guru-guru di Provinsi Riau masih dibawah rata-rata. Bahkan masih jauh dibawah rata-rata kompetensi nasional yang sebenarnya juga belum memenuhi nilai minimal, yaitu 7,0. Profesionalitas yang dibuktikan lewat uji kompetensi guru (UKG) memperlihatkan hasil yang jauh dari kata memuaskan. Nilai rata-rata guru Riau dalam UKG adalah 39,20 sedangkan rata-rata nasional 42,25.⁶

Permasalahan yang dihadapi di Kecamatan Keritang saat ini adalah kurangnya peningkatan kinerja guru yang sudah disertifikasi secara signifikan, belum ada perubahan yang berarti dan kinerjanya tidak jauh berbeda dari guru-guru yang belum disertifikasi.⁷ Tidak ada inovasi pada metode pembelajaran yang dilakukan oleh para guru bersertifikat, seperti : penyampaian materi pembelajaran yang tidak akurat; wawasan yang kurang dikarenakan rendahnya kesadaran membaca; kurang profesional pada saat di depan kelas serta tidak disiplin.⁸

Selain itu, terjadi kecurangan yang dilakukan oleh para guru dalam menyusun portofolio sebagai prasyarat kelulusan sertifikasi. Bentuk kecurangan dilakukan dengan memalsukan sertifikat guru dalam mengikuti forum ilmiah seperti seminar dan *workshop*. Dokumen yang dipalsukan yaitu dokumen berkas portofolio yang dikumpulkan guru ketika mengikuti sertifikasi seperti modul pembelajaran, lokakarya, seminar, pelatihan dan kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat yang tidak otentik. Contoh lain seperti dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi

para guru seringkali mengosongkan kegiatan pembelajaran di kelas karena mengikuti seminar atau *workshop*. Kondisi seperti inilah yang akhirnya mengganggu kegiatan pembelajaran di kelas.⁹

Masalah lain yang ditemui di lapangan adalah terjadi kekosongan kelas pada saat Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan melakukan inspeksi mendadak ke beberapa sekolah di daerah, fatalnya kesalahan tersebut dilakukan oleh para guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik.¹⁰ Selain itu, penggunaan uang tunjangan yang tidak sesuai dengan harapan menjadi salah satu faktor yang memperlambat peningkatan kinerja para guru, ditambah dengan kondisi daerah dan pembangunan infrastruktur yang lamban sehingga mempersurut niat dan motivasi para guru untuk mengenal dunia pendidikan di era globalisasi.¹¹ Jika fenomena di atas terjadi secara terus – menerus, maka bisa dibayangkan masa depan pendidikan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian terletak di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir karena perkembangan pendidikan di daerah tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan. Masih banyak anak-anak usia sekolah belum dapat mengenyam atau menduduki bangku sekolah sebagaimana mestinya. Data statistik menunjukkan, sebanyak 48,5% anak usia SD yang belum/tidak bisa mengenyam

⁶ Tribun Pekanbaru, 29 Januari 2014. *Kompetensi Guru Rendah Sesepeuh Sambangi Disdik*. Hal:23

⁷ M. Syamsi. 8 oktober 2013. *Sertifikasi Guru, Antara Mutu dan Problematikanya*. Posmertro Indragiri. Hal : 7

⁸ Berdasarkan pada pengamatan di SDN 024 Kotabaru Kecamatan Keritang. 28-30 Januari 2014.

⁹ Hasil wawancara dengan guru SDN 024 Kotabaru Seberida. 30 Januari 2014

¹⁰ Wawancara Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Keritang, 3 Februari 2014.

¹¹ Wawancara Kepala Seksi Peningkatan Mutu Profesi Pendidik Kabupaten Indragiri Hilir, 6 Februari 2014.

bangku pendidikan secara formal. Sementara itu, keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan penyebaran sekolah-sekolah belum menjangkau seluruh daerah secara merata. masih terasa sangat kurang di Kecamatan Keritang.¹²

Sumber data pada penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder yang meliputi : hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bagian Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, UPTD Pendidikan Kecamatan Keritang, DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, LPMP Provinsi Riau, Pengawas Sekolah Tingkat SD, Ketua PGRI Kecamatan Keritang, Kepala Sekolah SD, Guru SD, Komite Sekolah, Media cetak, Masyarakat; Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan, Instrumen Penilaian Kinerja dalam Pelaksanaan Sertifikasi Guru dan buku-buku terkait dengan penelitian serta jurnal ilmiah, skripsi dan tesis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif, yakni dengan menggunakan model analisis interaktif dimana penulis terjun langsung ke lokasi penelitian dan secara langsung berinteraksi dengan narasumber dengan tujuan mendapatkan informasi seakurat mungkin. Data yang penulis peroleh selanjutnya dikelompokkan menurut jenis dan kegunaannya masing-masing, kemudian data tersebut diolah dan dianalisa secara kualitatif menurut teori dan kerangka pemikiran lalu disajikan dalam bentuk uraian pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar di

Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Keritang Tahun 2012

Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses kehidupan manusia. Melalui pendidikan setiap individu mampu mengembangkan potensi yang ada didalam diri untuk melangsungkan kehidupan. Output dari pelaksanaan pendidikan adalah terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas baik dari segi spiritual, intelegensi maupun kemampuannya. Banyaknya problematika dibidang pendidikan menuntut pemerintah pusat untuk tanggap menghadirkan solusi – solusi guna memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Beberapa contoh kebijakan yang dikeluarkan seperti perubahan kurikulum pendidikan, mengadakan program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), peningkatan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan pelaksanaan sertifikasi guru. Fokus penelitian ini terletak pada peningkatan kompetensi guru SD pasca diberikan sertifikat pendidik sebagai tenaga profesional.

A. Karakteristik Permasalahan Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses kehidupan manusia. Melalui pendidikan setiap individu mampu mengembangkan potensi yang ada didalam diri untuk melangsungkan kehidupan. Output dari pelaksanaan pendidikan adalah terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas baik dari segi spiritual, intelegensi maupun kemampuannya. Problematika yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa tujuan

¹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. 2012. *Kecamatan Keritang dalam Angka 2012 Hal* : 22..

pelaksanaan sertifikasi kurang tercapai dikarenakan guru – guru yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik belum mampu mengubah *mindset* mengenai pentingnya peran guru dalam proses peningkatan kualitas belajar murid. Berikut akan dipaparkan beberapa indikator yang terkait dengan karakteristik permasalahan pendidikan yang terjadi di Kecamatan Keritang.

1. Tingkat Kesulitan Teknis Masalah Pendidikan

Sejak lahirnya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, berangsur – angsur pemerintah mulai mengeluarkan payung hukum sebagai aturan pelaksana kegiatan sertifikasi guru, dimulai dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan dan terakhir Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 sebagai aturan pengganti dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009.

Guru sebagai agen pendidik memiliki peran strategis dalam upaya perbaikan kualitas pendidikan. Dalam hal ini kedudukan guru pada jenjang sekolah dasar menjadi faktor yang sangat penting dalam usaha pencapaian tersebut karena tanpa menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) anak didik tidak akan bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Alasan lain dapat dijelaskan melalui pendapat Carin Sund yang membagi perkembangan intelektual pada seseorang menjadi empat tahap secara berurutan, yaitu : tahap sensori motor (0 – 2 tahun); tahap praoperasional (2-7 tahun) ; operasional konkrit (7 – 11 tahun); dan operasional formal (11 tahun keatas). Pada saat menduduki bangku SD, seorang anak sedang mengalami pengembangan

intelektual tahap operasional konkrit, dimana pada usia tersebut seorang anak mulai berpikir secara rasional. Anak – anak sudah mulai memperlihatkan kemampuan berpikir kombinatorik, reversibilitas, asosiatif dan identik. Sehingga peranan guru sebagai pengganti orang tua di sekolah menjadi sangat penting. Diperlukan guru – guru yang terampil dan profesional untuk dapat membentuk pribadi yang baik pada anak. Oleh karena itu kehadiran sertifikasi guru merupakan salah satu solusi dan apresiasi yang diberikan pemerintah kepada tenaga pendidik untuk membuktikan kualifikasi pendidikannya melalui sertifikat pendidik.

Ditinjau dari segi permasalahan sosial, secara teknis masalah pendidikan merupakan permasalahan yang kompleks ataupun sulit untuk dikendalikan karena keberadaannya sebagai fondasi utama untuk melahirkan sumber daya yang berkualitas. Dampaknya akan berakibat pada permasalahan ekonomi, sosial dan budaya.

Secara empirik fenomena yang terjadi mengarah kepada kualitas pendidikan yang belum memuaskan. Banyak hal yang mempengaruhi keterlambatan peningkatan pendidikan tersebut, seperti pembangunan daerah, tata kerja dan tata laksana aparat pemerintah serta dukungan dari masyarakat.

Pendidikan sebagai kebutuhan dasar dari setiap manusia tidak serta – merta dapat terlaksana sebagai mana mestinya. Keinginan yang kuat dari masing – masing pribadi tidak cukup menjadi solusi perkembangan pendidikan. Lingkungan pelaksanapun menjadi faktor yang sangat penting.

2. Tingkat Kemajemukan Kelompok Sasaran (Kasus : Guru)

Sasaran dari pelaksanaan kebijakan sertifikasi adalah guru. Guru yang profesional akan mendidik murid –

muridnya dengan baik dan kemudian berimplikasi pada peningkatan intensitas belajar dan pemahaman anak yang berujung pada peningkatan kualitas pendidikan. Teori sosiologi menjelaskan bahwa keberadaan seseorang pada kelompok yang sama cenderung akan menciptakan orientasi yang sama pula. Kebiasaan yang terjadi pada guru – guru di daerah adalah kurangnya kesadaran akan rasa disiplin pada diri mereka. Ditambah lagi, kondisi seperti ini seakan – akan menjadi virus bagi guru – guru yang lain untuk berlomba – lomba menjadi tidak disiplin terutama untuk masuk tepat waktu.

Keberadaan kebijakan sertifikasi seharusnya mampu menjawab permasalahan rendahnya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh para guru. Sasaran dari kebijakan ini sudah sangat jelas, ditambah lagi secara geografis guru – guru di Kecamatan Keritang dipersatukan dengan latar belakang sosial yang sama. Agama dan suku seharusnya menjadi sebagian faktor yang mempengaruhi kesamaan pola pikir dan pola perilaku dari guru. Dengan demikian kondisi sosio – kultural guru – guru di daerah ini bisa tergolong homogen.

3. Persentase Guru dan Murid di Kecamatan Keritang

Merujuk pada data yang peneliti dapatkan, total guru yang mengajar di Kecamatan Keritang pada tahun 2012 berjumlah 639 orang yang menyebar di 40 SD. Sedangkan jumlah penduduk di Kecamatan Keritang berdasarkan sensus pada tahun 2012 adalah sebanyak 64.029 orang.

Dengan demikian, persentase jumlah guru terhadap penduduk di kecamatan Keritang adalah sebesar 0,99%. Dari 639 orang guru yang mengajar di SD hanya 24 orang guru atau sekitar 3,7% dari total

seluruh guru yang telah memiliki sertifikat pendidik pada tahun 2012.

Dari jumlah keseluruhan Guru SD yang menyandang status PNS di Kecamatan Keritang, terlihat bahwa guru dengan kualifikasi S1 atau D4 berjumlah 191 orang atau sekitar 74,3% dari jumlah keseluruhan guru. Dengan demikian potensi guru – guru tersebut untuk memiliki sertifikat pendidik sangat besar.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah anak usia sekolah dasar di Kecamatan Keritang mencapai angka 12.694 jiwa atau sekitar 19,8% dari total jumlah penduduk di Kecamatan Keritang. Sedangkan jumlah anak usia sekolah yang belum atau tidak bersekolah mencapai angka 6.161 jiwa atau sekitar 48,5% dari jumlah keseluruhannya. Melihat kondisi tersebut maka akan tergambar proses perkembangan sumber daya manusia di daerah ini karena hanya sebagian kecil sasaran yang memiliki kualitas jika dibandingkan dengan total populasi di Kecamatan Keritang.

4. Perubahan Perilaku yang Diharapkan (Kasus : Guru)

Layaknya kebijakan – kebijakan lain, kebijakan sertifikasi juga menjadi salah satu solusi dari masalah dibidang pendidikan. Untuk itu perlu adanya perubahan – perubahan perilaku yang mengarah pada perencanaan. Pada bagian ini akan dipaparkan apa saja perubahan perilaku dari kelompok sasaran (guru) yang diharapkan dengan diadakannya program tersebut.

Sertifikasi guru dalam proses pendidik sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Kompetensi guru yang bagus sebanding dengan kesejahteraan yang membaik diharapkan mampu meningkatkan kinerja sehingga dapat membuahkan

pendidikan yang bermutu. Departemen Pendidikan Nasional mengungkapkan bahwa tujuan sertifikasi guru adalah menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran, meningkatkan profesionalitas guru, meningkatkan proses hasil pendidikan, mempercepat pendidikan nasional. Manfaat dari pelaksanaan sertifikasi guru dalam pendidikan adalah melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten yang dapat merusak citra profesi guru, melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional untuk meningkatkan kesejahteraan guru.¹³

Pemberian sertifikat pendidik sesuai dengan tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalitas guru dengan cara penentuan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Cakupan perubahan yang diharapkan bersifat kognitif meliputi peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru. Lebih lanjut, domain kompetensi guru yang diharapkan perubahannya adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.¹⁴

Berdasarkan keempat indikator kemampuan tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir yang diwakili oleh Pengawas Tingkat SD di Kecamatan Keritang bermitra dengan UPTD Pendidikan Kecamatan Keritang melaksanakan Penilaian Kinerja Guru untuk tingkat

Sekolah dasar. Hasil Penelitian yang dilakukan di SDN 024 Kotabaru Seberida menunjukkan bahwa Penilaian Kinerja Guru melalui Instrumen Penilaian Kinerja dalam Pelaksanaan Pembelajaran rata – rata mendapatkan skor 3 dari skala 4 dengan rentang nilai 70 – 90.

Dari delapan orang guru dengan total 11 orang guru yang mengajar di SDN 024 Kotabaru, memperlihatkan adanya kinerja yang baik dalam pelaksanaan pembelajaran. Penelitian ini menjelaskan bahwa secara umum penilaian terhadap kinerja guru mendapatkan prediket baik namun perlu diperhatikan kinerja individu dari masing – masing guru tersebut. Berdasarkan penilaian yang dilakukan tingkat keberhasilan maksimal dicapai oleh guru – guru yang belum mendapatkan status sebagai pendidik profesional. Hal ini disebabkan guru – guru tersebut masih terbilang muda dalam pengalaman kerja. Dan kondisi sebaliknya didapatkan dari guru – guru yang sudah disertifikasi. Meskipun mereka sudah sangat berpengalaman di dunia pendidikan tetapi tidak ada jaminan para guru senior lebih cakap dalam proses belajar mengajar di kelas dibandingkan dengan guru – guru muda. Selain penilaian yang diberikan kepada para guru, peningkatan kualitas pendidikan tidak lepas dari keberhasilan murid untuk menuntaskan jenjang sekolahnya yang dibuktikan melalui pencapaian mereka pada saat mengikuti Ujian Nasional (UN). Hasil dari data olahan nilai UN untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang diterima peneliti melalui UPTD Pendidikan Kecamatan Keritang memperlihatkan bahwa terjadi penurunan nilai Bahasa Indonesia pada tahun 2013/2014 sedangkan untuk bidang studi Matematika dan IPA mengalami peningkatan meskipun belum secara signifikan.

¹³ Malalina. 15 September 2011. Problematika Pelaksanaan Sertifikasi Guru ditinjau dari Landasan Filsafat Pendidikan. Diakses tanggal 1 Agustus 2014.. Waktu : 16.00 wib. <http://pendidikan.com>.

¹⁴ Modul Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru. Badan Pengembangan SDMP dan PMP Kementrian Pendidikan Nasional Tahun 2013.

Tabel 3.6
Rekapitulasi Nilai UN SD
Di Kecamatan Keritang Tahun 2010-2014

No	Tahun	Rata – rata Bidang Studi		
		B. IND	MTM	IPA
1	2010/2011	7.46	6.34	7.05
2	2011/2012	7.22	6.87	7.06
3	2013/2014	7.22	6.87	7.06

Sumber : UPTD Pendidikan Kecamatan Keritang

Dengan melihat permasalahan pendidikan yang terjadi di Kecamatan Keritang, maka tidak salah ketika banyak orang tua yang meragukan jaminan mutu dari pendidikan anak – anak mereka. guru sebagai tenaga profesional harus mampu melakukan perubahan – perubahan perilaku dalam pengajaran sesuai dengan standar yang telah diberikan oleh Kementrian Pendidikan Nasional.

B. Karakteristik Kebijakan Sertifikasi Guru

Karakteristik kebijakan membahas mengenai kemampuan badan pelaksana untuk menstrukturkan proses implementasi kebijakan. Kebijakan yang dilaksanakan pemerintah tidak selamanya berjalan baik, bahkan tidak sedikit kebijakan yang mengalami permasalahan dalam proses implementasinya. Kondisi tersebut bisa menyebabkan pemerintah mendapatkan tantangan – tantangan dari pihak luar maupun pelaku dari kebijakan itu sendiri.

1. Kejelasan Isi Kebijakan Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru sebagai salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintah untuk mengapresiasi kinerja guru yang menjadi tenaga pendidik merupakan suatu kebijakan yang masih terbilang baru dilaksanakan di Indonesia. Melalui kehadiran Undang –

Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan yang mana sebelumnya telah dilaksanakan melalui Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009, guru – guru dituntut untuk menjadi tenaga pendidik yang profesional. Melalui UU ini seluruh guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik diberikan jam mengajar tambahan sebanyak 24 jam dalam 1 minggu jam kerja dengan imbalan berupa tunjangan sebesar satu kali gaji perbulan yang diberikan kepada guru – guru tersebut. Seluruh aturan mengenai pelaksanaan sertifikasi dimuat dalam aturan tersebut, dimulai dari aktor – aktor pelaksana, syarat dan kewajiban guru dan bentuk – bentuk penilaian yang akan dilaksanakan. Panduan – panduan yang diberikan kepada para guru untuk teknis pelaksanaan seleksi sertifikasi sudah sangat baik.

Peraturan yang digunakan oleh Dinas Pendidikan merupakan aturan penyeleksian sertifikasi guru. Sedangkan aturan yang digunakan dalam tahap pelaksanaan tugas dan kewajiban di sekolah belum ada. Sanksi yang diberikan berupa inisiatif yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan untuk kemudian dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan demikian, isi kebijakan implementasi sertifikasi guru belum jelas karena belum dibuatnya aturan pelaksana di tingkat provinsi maupun kabupaten terkait tugas, fungsi, hak, kewajiban dan wewenang guru – guru yang sudah menjalani proses sertifikasi.

2. Dukungan Teoritis Kebijakan Sertifikasi

Dukungan teoritis akan lebih memantapkan suatu aturan atau kebijakan yang dibuat karena tentunya sudah teruji. Namun, karena konteks dalam pembuatan kebijakan adalah menyangkut masalah sosial yang meski secara umum terlihat sama

di setiap daerah, akan tetapi sebenarnya terdapat hal-hal yang sedikit banyak berbeda sehingga untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan modifikasi saja.

Penjelasan yang disampaikan oleh Kasi Peningkatan Mutu dan Profesi Pendidik Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dan Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir menggambarkan bahwa secara administratif proses pelaksanaan seleksi sertifikasi guru berjalan dengan baik melalui payung hukum yang jelas, permasalahan yang terjadi lebih banyak pada tahap pelaksanaan pengajaran pasca diberikannya sertifikat pendidik kepada para guru. Penyebab utama dari kesimpang – siuran pelaksanaan adalah dikarenakan belum adanya aturan baku yang mengatur mengenai hak, kewajiban dan sanksi yang akan diberikan kepada para guru yang terbukti melakukan pelanggaran.

3. Alokasi Sumber Daya Finansial Pasca Seleksi Sertifikasi

Hal yang tak dapat dipungkiri dalam mendukung pengimplementasian suatu kebijakan adalah masalah keuangan/modal. Setiap program tentu memerlukan staff untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, memonitor program, dan mengelola sumber daya lainnya yang kesemua itu memerlukan modal.

Pendanaan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini ternyata tidak termasuk kedalam alokasi dana pendidikan. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Keritang menjelaskan bahwa daerah tidak memiliki alokasi dana untuk program pengawasan khusus bagi guru – guru yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik. Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara umum untuk keseluruhan guru yang dilaksanakan oleh masing – masing

Pengawas Sekolah. Indikator penilaian yang diberikan sama antara guru yang sudah disertifikasi dengan guru yang belum mendapatkan sertifikat pendidik tersebut. Permasalahan ini berdampak pada motivasi kerja guru. Jika guru yang sudah disertifikasi mendapatkan perlakuan yang lebih khusus maka peningkatan kualitas pendidikan akan semakin membaik. Selain itu, guru – guru yang sudah disertifikasi akan mampu memotivasi teman – teman mereka untuk bertindak lebih baik sesuai dengan peningkatan kemampuan yang terjadi pada guru yang sudah disertifikasi.

4. Keterpautan dan Dukungan Antar Berbagai Lembaga Pelaksana (Dinas Pendidikan Kabupaten, UPTD Pendidikan, Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah)

Keterpautan dan dukungan yang diberikan antara berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi terlihat sangat baik. Adanya kemauan dari Dinas Pendidikan dan UPTD Pendidikan Kecamatan untuk senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan secara persuasif kepada para guru. Di lapangan, kehadiran Pengawas untuk melakukan supervisi ke setiap sekolah merupakan salah satu cara yang dilakukan para pihak terkait untuk tetap menjaga eksistensi profesionalitas guru.

Selain itu, peran Kepala Sekolah juga sangat penting. Pengawas sebagai mitra dari UPTD Pendidikan hanya melakukan supervisi pada waktu – waktu tertentu. Disinilah kepala sekolah sebagai pimpinan diwajibkan untuk mampu mengayomi seluruh bawahannya agar senantiasa melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan hak yang telah didapatkan

Secara umum keterpautan dan dukungan yang diberikan oleh lembaga

pelaksana sudah sangat baik. Kerjasama dan koordinasi yang dijalin secara berkelanjutan akan membantu suksesnya proses pelaksanaan suatu kebijakan.

5. Kejelasan dan Konsistensi Aturan Yang Ada pada Badan Pelaksana

Terkait dengan pembahasan sebelumnya bahwa badan pelaksana tingkat daerah belum memiliki aturan tertulis mengenai pedoman pelaksanaan sertifikasi. Baik dalam hal pedoman pelaksanaan, pemberian sanksi dan *reward* ataupun sistem penilaian khusus yang diberikan kepada guru – guru yang sudah disertifikasi. Dibutuhkan aturan yang jelas sebagai pedoman tata cara dan tata laksana bagi para guru untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik. Melalui penelitian yang dilakukan, sudah ada pemikiran – pemikiran yang baik untuk memperjelas aturan – aturan pelaksanaan. Hanya saja lembaga tersebut masih terkendala oleh biaya sehingga terjadi kesulitan pada saat akan dilakukan *action*. Belum adanya kejelasan dan konsistensi dari aturan pelaksana membuka peluang para guru untuk bertindak tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah.

7. Komitmen Aparat Terhadap Tujuan Kebijakan

Salah satu faktor utama kesuksesan implementasi sebuah kebijakan adalah adanya komitmen yang kuat dari aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Komitmen mencakup keseriusan dan kesungguhan agar penerapan suatu peraturan ataupun kebijakan bisa berjalan dengan baik dan diterima serta dipatuhi oleh sasaran dari kebijakan tersebut.

Beberapa saran yang diberikan agar pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan tujuannya bisa menjadi bahan acuan

program kerja pelaksanaan badan – badan terkait. Dengan diberikannya peluang kepada guru untuk mengembangkan potensi maka akan tercipta perubahan – perubahan pola pikir yang lebih baik. Ditambah lagi dengan pemberian penilaian individu yang akan memacu kreatifitas setiap guru untuk berprestasi.

8. Partisipasi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan sertifikasi di Kecamatan Keritang kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat setempat karena sasaran dari pelaksanaan kebijakan ini adalah guru. Secara umum, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah menyebabkan timbulnya sikap tidak peduli dari golongan tersebut. Bentuk partisipasi yang diberikan terpusat melalui rapat komite, itupun hanya dihadiri oleh sedikit orang tua wali murid disebabkan kesibukan mereka untuk meningkatkan pendapatan.

Meskipun demikian, tidak semua masyarakat yang berperilaku seperti di atas. Ada sebagian orang tua yang membentarkan perhatian khusus kepada anak – anak mereka dengan cara menghubungi langsung wali kelas ataupun guru yang mereka kenali. Kecendrungan seperti contoh di atas tidak lepas dari latar belakang sosial dan pendidikan masyarakat setempat yang memang masih tertinggal dari dunia global.

C. Lingkungan Kebijakan Sertifikasi Guru

Beberapa indikator yang menjadi ukuran keberhasilan implementasi kebijakan melalui variabel lingkungan adalah kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Keritang, dukungan publik terhadap kebijakan sertifikasi guru, sikap dari kelompok masyarakat dan tingkat komitmen dan keterampilan para guru.

1. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Keritang

Seperti yang telah dijelaskan diawal, masyarakat di Kecamatan Keritang sebagian besar bersuku Melayu dan sering juga disebut Melayu Riau. Dipandang dari sudut budaya dan genetis sosial masyarakat di daerah ini bersifat homogen. Dominasi agama islam yang sangat identik dengan budaya Melayu menambah kekerabatan masyarakat setempat.

Masyarakat di daerah ini rutin mengadakan peringatan hari besar agama Islam, selain itu kegiatan mingguan yang bernuansa agama islam senantiasa dilaksanakan turun – temurun, seperti yasinan, barzanji, rebana, dan sebagainya. Penduduk yang berada di Kecamatan Keritang berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2012 berjumlah 64.029 jiwa.

Pada umumnya masyarakat di daerah ini mempunyai mata pencaharian dibidang pertanian yang secara langsung diolah oleh petani – petani lokal. Kecamatan Keritang memiliki potensi sebagai daerah pertanian, ini diketahui dari penggunaan tanah yang dirinci menurut penggunaannya baik luas lahan sawah maupun luas bukan sawah.

Kondisi masyarakat yang masih cenderung bersifat tradisional menjadi salah satu penyebab sulitnya kebijakan ini mendapatkan pengawasan dari masyarakat. Sebagian masyarakat di Kecamatan Keritang menyandarkan kehidupannya pada pertanian dan perkebunan. Merujuk pada potensi daerah dengan produksi yang mencapai 28.600,16 ton produksi padi pada tahun 2011.¹⁵

¹⁵ Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir

Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat pesat juga mempengaruhi perilaku dari masyarakat. Masyarakat bersifat konsumtif bukan berdasarkan pada kebutuhan tetapi hanya sekedar untuk mengikuti *trend* tanpa memikirkan secara detail fungsi dari barang – barang elektronik yang mereka miliki. Gadget seakan – akan menjadi barang primer yang hingga saat ini melayang bebas pada anak – anak usia SD. Jika penggunaan barang – barang elektronik ini tanpa didampingi oleh orang tua maka seorang anak akan menggunakan sesuka hatinya. Tantangan seperti itulah yang saat ini sedang dihadapi masyarakat Kecamatan Keritang. Teknologi yang seharusnya dimanfaatkan untuk mengembangkan pengetahuan hanya menjadi barang mainan di tangan anak – anak usia sekolah dasar. Kurangnya perhatian yang diberikan oleh para orang tua cenderung membuat anak menjadi sulit memanfaatkan teknologi yang berada di sekeliling mereka.

Besarnya harapan yang diberikan orang tua kepada lembaga pendidikan menjadi salah satu gambaran bahwa peran guru di sekolah sebagai agen pelaksana pendidikan sangat penting. Ditengah kesibukan orang tua dan kondisi sosial masyarakat yang masih tergolong tradisional guru menjadi langkah solutif yang diberikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kecamatan Keritang.

2. Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Sertifikasi

Kondisi sosial – ekonomi masyarakat setempat sangat berpengaruh terhadap dukungan atas suatu kebijakan. Mayoritas pekerjaan masyarakat di Kecamatan Keritang adalah petani. Karena kesibukan inilah kemudian masyarakat setempat cenderung mengenyampingkan pendidikan. Bahkan tidak sedikit orang tua yang tidak mengetahui perkembangan dunia

pendidikan. Mereka hanya sekedar membiayai putra – putri mereka untuk sekolah, faktor – faktor pendukung tidak diperhatikan, seperti pemberian motivasi dari orang tua. Keberadaan keluarga sebagai lingkungan pertama bagi anak untuk mempelajari segala hal tidak berjalan dengan efektif.

Untuk menghimpun seluruh pendapat dari wali murid, pihak sekolah senantiasa mengadakan rapat bersama Komite Sekolah. Melalui forum tersebut para wali murid diberi kesempatan untuk menyampaikan kritik dan sarannya secara langsung kepada pihak sekolah

Selain dukungan yang diberikan oleh wali murid, media dalam hal ini juga ambil bagian. Media sebagai agen kontrol dan penyedia informasi memanfaatkan fungsinya semaksimal mungkin untuk menunjang perbaikan di Kecamatan Keritang. Wawancara yang peneliti lakukan bersama salah seorang reporter media cetak Posmetro Indragiri memperlihatkan bahwa adanya dukungan yang kuat dari masyarakat untuk bersama – sama mengawasi kinerja para guru

Dukungan publik terhadap sertifikasi guru sangat beragam. Pandangan tersebut berdasar pada latar belakang sosial informan yang diteliti. Perbedaan pandangan yang disampaikan para wali murid dipengaruhi oleh pengetahuan yang berbeda mengenai sertifikasi guru. Pada dasarnya wali murid menyadari terjadi perubahan dan peningkatan pola belajar pada anak – anak mereka. Sedangkan tanggapan yang diberikan media menyatakan bahwa pelaksanaan sertifikasi guru memiliki dampak tersendiri bagi pelakunya. Sejauh ini, pengaduan yang diterima media masih berkisar pada kritik kinerja para guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik yang tidak sesuai dengan tunjangan yang mereka

terima. Masih banyak guru berstatus sertifikasi tetapi kompetensinya belum meningkat. Diharapkan penerimaan tunjangan dan peningkatan kompetensi guru dapat berjalan selaras.

3. Sikap Dari Kelompok Masyarakat terhadap Kebijakan Sertifikasi

Kritik yang disampaikan oleh masyarakat melalui Komite Sekolah, media cetak, media *online*, maupun penyampaian secara langsung kepada guru lebih membahas terkait keluhan wali murid terhadap perkembangan anak mereka. Kesibukan yang menjadi rutinitas para wali murid menjadi salah satu penyebab mereka untuk mempercayakan penuh kepada lembaga pendidikan untuk memberikan pembelajaran kepada anak – anak mereka. Harapan yang disampaikan melalui rapat sekolah diagendakan kedalam program – program kerja sekolah yang bersangkutan. Masukan tersebut berkisar kepada pelaksanaan ekstrakurikuler dan pengembangan peserta didik diluar jam belajar normal. Seperti pelaksanaan pramuka, *drumband*, ataupun les sekolah. Masukan yang diberikan wali murid disampaikan kepada Komite Sekolah untuk kemudia dibahas pada rapat Komite.

Pelaksanaan kebijakan sertifikasi kurang mendapat perhatian dari wali murid dikarenakan kurangnya pemahaman mereka mengenai kebijakan ini. Para wali murid beranggapan bahwa guru sebagai agen pendidikan memiliki pengetahuan yang kompeten dibidangnya masing – masing. Oleh karena itu, wali murid cenderung hanya menyorot masalah yang berkaitan dengan dana dan pembangunan sekolah.

4. Tingkat Komitmen dan Keterampilan Guru

Bentuk komitmen yang dilakukan oleh para guru yang bersertifikat secara administratif dilakukan melalui persiapan pembelajaran, seperti pembuatan RPP, silabus, media pembelajaran dan sebagainya.

Selain itu peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional dilakukan dengan cara mengikuti berbagai pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Dengan komitmen yang kuat dari para guru untuk meningkatkan kemampuannya maka secara bertahap akan terlaksana pencapaian yang maksimal terhadap tujuan pelaksanaan sertifikasi guru.

KESIMPULAN

- Karakteristik masalah pendidikan di Kecamatan Keritang meliputi kurangnya komitmen dan disiplin para guru dalam memenuhi kewajibannya sebagai pengajar profesional, terjadinya kesulitan dalam pendistribusian sarana pembelajaran, lambannya pembangunan infrastruktur di daerah, rendahnya persentase guru SD yang sudah disertifikasi, rendahnya jumlah anak usia sekolah dasar yang mengenyam pendidikan serta tidak adanya perbedaan kualitas kinerja guru yang sudah disertifikasi dengan yang belum mendapatkan sertifikat pendidik.
- Melalui karakteristik kebijakan disimpulkan bahwa pelaksanaan seleksi sertifikasi merujuk pada aturan pemerintah pusat yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Sedangkan ditingkat daerah belum ada perda yang khusus membahas mengenai sertifikasi guru pasca pelaksanaan seleksi, sehingga belum ada payung hukum yang mempertegas gagasan yang disampaikan oleh lembaga

pelaksana. Hal ini dikarenakan tidak adanya alokasi dana yang diberikan serta kurangnya perhatian masyarakat terhadap kualitas pendidikan di Kecamatan Keritang.

- Lingkungan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Kecamatan Keritang. Masyarakat cenderung memiliki pola pikir yang tradisional karena sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani yang disibukkan dengan rutinitas kerja. Oleh karena itu, wali murid memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada lembaga pendidikan. Dukungan yang diberikan disampaikan melalui komite sekolah dan media massa. Selain itu, kurangnya komitmen dan keterampilan yang dimiliki oleh guru mempengaruhi kualitas pendidikan di Kecamatan Keritang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Setiadi. 2013. *PHP (Politik Harapan Palsu) : Janji-Janji Politik yang Tidak Ditepati*. Yogyakarta : Ircisod.
- Arif Rohman dan Teguh Wiyono. 2010. *Education Policy In Decentralization Era*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Aris Shoimin. 2013. *Excellent Teacher : Meningkatkan Profesionalisme Guru Pasca Sertifikasi*. Semarang : Dahara Prize.
- Azhari Zakri. 2011. *Pengantar Pendidikan*. Bahan Ajar Materi Kuliah FKIP PKn. Pekanbaru : Riau.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. 2012. *Kecamatan Keritang dalam Angka 2012*.
- Bagong Suyanto, Sutinah. 2007 *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan* Jakarta : Kencana.
- B.N Marbun. 2007. *Kamus Politik*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.

----- 2014. *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS.

Daniel Mazmanian, Paul Sabatier. 1983. *The Implementation of Public Policy*. University of California

Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*. Jakarta : Rajawali Pers.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. 2008. *Pedoman Penulisan dan Proedur Ujian Skripsi FISIP UNRI*. Pekanbaru : UR Press.

Hamidi. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif : Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang : Ummppress.

Masnur Muslich. 2007. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Riant Nugroho. 2011. *Public Policy : Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

----- 2008. *Kebijakan Pendidikan yang Unggul*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Solichin Abdul Wahab. 2012. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.

Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Taliziduhu Ndraha. 1999. *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Rineka Cipta.

Widodo. 2012. *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian : Skripsi, Tesis dan Disertasi Praktis dan Dilengkapi Contoh*. Jakarta : Magnascript Publishing.

Jurnal, Skripsi dan Tesis

Amiruddin Husaini. 2006. *Implementasi Kebijakan Pendidikan : Studi Manajemen Berbasis sekolah (MBS) pada Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bengkalis Tahun 2007-2009*. Pekanbaru : Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UR.

Firmansyah. 2008. *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Kampar Kiri Hulu (Studi Kasus Pengembangan Kecamatan (PKK) Tahun 2006)*. Pekanbaru : Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau.

Gumilar Rusliwa Somantri. 2005. *Memahami Metode Kualitatif – Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Volume 9 Nomor 2*.

Hasan Subhan. 2012. *Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru di SMA Negeri 1 Jatibarang dan SMA Negeri 1 Jatinyuat Kabupaten Indramayu*. Jakarta : Program Studi Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.

Muhamad Aos Nuari. 2012. *Analisis Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Palmerah Jakarta Barat*. Jakarta : Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Indonesia.

Oktora Melansari. 2010. *Analisis Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur*. Jakarta : Tesis FISIP Universitas Indonesia.

Rukiyati. 2013. *Urgensi Pendidikan Karakter Holistik Komprehensif di Indonesia. Jurnal Pendidikan Karakter, Tahun III, No. 2*. Yogyakarta : FIP Universitas Negeri Yogyakarta.

- Stella Marina Ignasia Pantou. 2012. *Modalitas dalam Kontestasi Politik (Studi Modalitas dalam Kemenangan Pasangan Hanny Sondakh Maximiliaan Lomban Pada Pemilukada Kota Bitung Sulawesi Utara Tahun 2010)*. Semarang : Tesis Program Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.
- Suarman, Almasdi Syahza. 2012. Jurnal Pendidikan. *Dampak Kebijakan Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru di Daerah Riau*. Pekanbaru : Lembaga Penelitian Universitas Riau.
- Suwardi. *Dampak Sertifikasi terhadap Peningkatan Kualitas Guru*. Jurnal Pendidikan
- Stella Marina Ignasia Pantou. 2012. *Modalitas dalam Kontestasi Politik (Studi Modalitas dalam Kemenangan Pasangan Hanny Sondakh Maximiliaan Lomban pada Pemilukada Kota Bitung Sulawesi Utara Tahun 2010)*. Tesis. Program Magister Ilmu Politik. Universitas Diponegoro Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sumber lain-lain

- Baskoro Poedjinoegroho. 5 Januari 2006. Diakses tanggal 23 Januari 2014. Waktu : 16.00 wib. <http://kopas.com>
- Fukuyama, F. (1995), *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, New York: Free Press, ISBN 0684825252
- Malalina. 15 September 2011. Problematika Pelaksanaan Sertifikasi Guru ditinjau dari Landasan Filsafat Pendidikan. Diakses tanggal 1 Agustus 2014. Waktu : 16.00 wib. <http://pendidikan.com>.
- Modul Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru. Badan Pengembangan SDMP dan PMP Kementrian Pendidikan Nasional Tahun 2013.
- Mujtahid. 25 Februari 2011. *Peran Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Diakses tanggal 23 Maret 2014. Waktu : 11.07 wib. www.uinmalang.ac.id
- M. Syamsi. 8 oktober 2013. *Sertifikasi Guru, Antara Mutu dan Problematikanya*. Posmertro Indragiri. Hal : 7
- Tribun Pekanbaru, 29 Januari 2014. *Kompetensi Guru Rendah Sesepuh Sambangi Disdik*.